

**PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Tentang Penyidikan di Polresta Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh :

RESZA DANANG WIJAYA

C.100120033

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Tentang Penyidikan di Polresta Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RESZA DANANG WIJAYA
C.100120033

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Kuswardani S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Februari 2017

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum

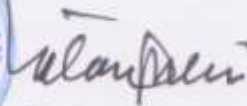
()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2017

Penulis



Resza Danang Wijaya

**PROSES PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Tentang Penyidikan di Polresta Surakarta)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak di tingkat penyidik dan untuk mengetahui hambatan yang dialami penyidik selama proses penyidikan berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik

Kata kunci : penyidikan, kekerasan seksual, anak

ABSTRACT

This study aims to determine the process of settlement of sexual abuse of children at the level of the investigator and to determine the barriers experienced investigators during the investigation takes place. The method used is empirical normative and descriptive research. The data source consists of primary data, interviews and secondary data is data of primary law. Methods of data collection done by field data synchronizes with legal regulations in force then analyzed qualitatively. The results showed that the process of settlement of sexual abuse of children is in conformity with the legislation in force, although there are tips and tricks certain not contained in the laws and legislation that used investigator

Keywords: investigation, sexual abuse, chi

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset keluarga dan bangsa yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak haruslah mendapatkan perlindungan baik itu dari segi hak maupun kebutuhan secara memadai dari orang tua, keluarga, masyarakat

dan negara untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang seutuhnya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) dari tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak siapapun atau pihak manapun.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali muncul fenomena permasalahan hukum yang dihadapi, diantaranya dengan munculnya permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke anak-anak bahkan balita. Pelakunya pun beragam mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya serta kebanyakan pelakunya adalah yang telah di kenal baik oleh korban.

Berbagai pemberitaan media elektronik hingga media cetak selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya pun dilakukan dengan berbagai macam cara. Terhadap gejala kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, Ratna Megawati dalam bukunya yang berjudul “*Budaya kekerasan dalam Perspektif keseimbangan Kualitas Gender*” mengemukakan bahwa didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, rusaknya lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya kriminalitas.¹

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang disekitarnya. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Anak

¹ Ratna Megawati, *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*, Kanisius, Bandung, 1982, hal. 21

yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani maupun rohani dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).³

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, bahwa anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Contohnya terakhir seperti pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan yuyun menunjukkan bahwa isu terbesar kejahatan sosial masih minim diberi perhatian oleh negara dan mengkhawatirkan, karena siapapun berpotensi menjadi korban maupun pelaku. Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau

² Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), hal.18

lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat.⁵ Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the world system conveys an impression of a complex to end*”⁶ artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan.

⁴ www.kpai.go.id/berita/pelaku-lebih-banyak-menyasar--anak-laki-laki/

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84

⁶ *Ibid.*, hal. 14

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative empiris, karena penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hal ini dapat diketahui dari prosedur penyidik Polresta Surakarta dalam proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dengan teknik dan strategi tertentu yang tidak terdapat didalam perundang-undangan (hukum positif) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap kasus dengan pelaku anak dan hambatan-hambatan yang ditemui selama penyidikan berlangsung. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif⁷ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang prosedur penyidikan dalam proses kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat didalam perundang-undangan dengan teknik dan strategi tertentu yang tidak terdapat didalam perundang-undangan seperti membujuk secara baik-baik terhadap pelaku anak agar mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan study lapangan dan study kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Penyidik Polresta Surakarta dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Surakarta

Mengenai penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya dalam penyidikan, penyidik diharuskan mengutamakan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam setiap proses penyidikan, mulai dari anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan yang merugikan korban, hak mendapatkan pelayanan karena korban mengalami

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Hal 5

penderitaan mental, fisik dan aspek psikologis lainnya serta tidak memaksa anak untuk memberikan keterangan.⁸

Kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Pemeriksaan penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapkan penyidik ialah tersangka. Dari sinilah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur yaitu tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Bilamana penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan.¹⁰ Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan petunjuk lain yang mendukung adanya peristiwa tersebut. Alat

⁸ Endang TH, Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Kamis, 24 November 2016, Pukul 11.23 WIB

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal 134.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal 136.

bukti tersebut diantaranya: visum dari korban dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Untuk lebih memperjelas tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, berikut langkah-langkah dalam penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Surakarta dalam penanganan terhadap korban meliputi: (a) Menerima laporan dari korban atau dari keluarga korban; (b) Melakukan pemeriksaan; (c) Melakukan *visum et repertum*; (d) Memberikan obat pencegah kehamilan untuk korban; (e) Menjalin kerjasama dengan psikiater; (f) Menyediakan fasilitas rumah aman (SHELTER); (g) Mengumpulkan saksi-saksi; (h) Memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau (SP2HP). Sedangkan penanganan terhadap pelaku sebagai berikut: (a) Pemanggilan atau penangkapan tersangka; (b) Penahanan sementara; (c) Penyitaan barang bukti; (d) Melakukan pemeriksaan; (d) Melakukan gelar perkara; (e) Pembuatan berita acara perkara; (f) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

Setelah proses penyidikan telah selesai maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

3.2 Bagaimanakah Perbedaan Proses Penyidikan Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Penyidik Polresta Surakarta terhadap Anak dengan Orang Dewasa di Wilayah Surakarta

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu semakin marak menimpa anak. Namun yang lebih memprihatinkan lagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan pula oleh anak. Hal ini disebabkan oleh semakin majunya perangkat teknologi seperti

handphone. Handphone sudah tidak lagi menjadi barang mewah, anak-anak sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut. Kontrol yang kurang dari orang tua dan pengaruh lingkungan menyebabkan anak-anak menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk menonton gambar atau adegan-adegan porno sehingga memicu nafsu birahi mereka untuk mencoba adegan tersebut kepada teman lawan jenis mereka.

Menurut Iptu Endang TH tidak ada istilah anak sebagai pelaku atau lebih tepatnya dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*. Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik.

Menurut Iptu Endang TH, selaku KASUBNIT I sebagai anggota penyidik unit PPA Polrestabes Surakarta, dalam proses penanganan perkara anak ditingkat Kepolisian, sebenarnya unit PPA Polrestabes Surakarta lebih mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga tidak perlu adanya upaya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya upaya akhir. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak di tingkat penyidik Kepolisian, tidaklah jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku orang dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik unit PPA terhadap pelaku anak, sama halnya dengan penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku dewasa tetapi ada beberapa hal yang menjadi kekhususan bagi anak yang tidak bisa dipandang sama dengan pemeriksaan terhadap pelaku orang dewasa. Hal ini perlu

dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi pelaku anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku anak, guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut. Berikut perbedaan proses penyidikan terhadap pelaku anak dengan orang dewasa terletak pada: (a) Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap pelaku anak adalah penyidik khusus anak, (b) Pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan dengan suasana kekeluargaan, (c) Dalam hal penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, (d) Penahanan terhadap pelaku anak hanya dikenakan pada anak yang berumur 14 tahun atau lebih dan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu seperti : kurir narkoba, pengulangan perbuatan dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

3.3 Hambatan yang Dialami Penyidik Unit PPA Polresta Surakarta dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Surakarta

Dalam proses penyidikan tindak pidana terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah Surakarta antara lain: *Pertama*, ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi setempat. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. *Kedua*, pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap dan memproses berkas tindak pidana tersebut kemungkinan besar berkas tersebut dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan jumlah kouta dari penyidik khususnya penyidik anak mengalami kekurangan personil. *Ketiga*, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam unit PPA Polresta Surakarta hanya 8 (delapan) orang penyidik anak, sehingga dalam pelaksanaan

pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Surakarta masih kurang maksimal. *Keempat*, kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi pendanaan dan tempat interogasi korban yang kurang memadai. *Kelima*, korban enggan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya. *Keenam*, perlindungan anak belum prioritas bagi pemerintah Indonesia meskipun kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Hal ini terkait dengan aparat penegak hukum di Indonesia selama ini belum memiliki respon yang tinggi terhadap perlindungan anak. Kasus ini semakin tidak menjadi krusial dikarenakan tidak ada unsur politisnya. *Ketujuh*, apabila si korban mengalami cacat atau penyandang disabilitas.

4. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka dalam suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. *Kedua*, dalam proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak di tingkat penyidik Kepolisian, tidaklah jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku orang dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya unit PPA Polrestabes Surakarta lebih mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga tidak perlu adanya upaya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya upaya akhir. *Ketiga*, hambatan yang dialami penyidik selama melakukan

proses penyidikan untuk mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak, antara lain: (a) Pelaku melarikan diri, (b) Penyidik memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap kasus, (c) Kurangnya jumlah personil, (d) Kurangnya sarana dan prasarana, dari segi pendanaan dan tempat interogasi korban maupun pelaku anak yang kurang memadai (e) Korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena ia merasa malu dan merupakan aib bagi dirinya, (f) Perlindungan anak di Indonesia belum menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, (g) Korban adalah penyandang disabilitas.

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian di bidang penyidik unit PPA, haruslah menambah jumlah personil dan menambah jangka waktu penyidikan agar proses penyelesaian kekerasan seksual selesai dengan cepat dan tepat serta tidak tertunda-tunda. *Kedua*, bagi pihak kepolisian, diharapkan menambah jumlah anggaran di tingkat kota madya agar korban dari kalangan tidak mampu dapat melakukan visum karena sebagian besar korban berasal dari kalangan kurang mampu dan sering merasa keberatan untuk melakukan pembayaran proses visum dan fasilitas pendukung lainnya seperti, ruang pemeriksaan yang memadai agar terciptanya kenyamanan bagi semua pihak. *Ketiga*, bagi masyarakat yang mengetahui tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk turut aktif dalam memberantas kejahatan tersebut dan turut andil dalam pelaporan kejadian serta tidak menyudutkan korban agar terciptanya suasana yang aman dan kondusif di segala segi kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.
- Megawati, Ratna. 1982. *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*. Kanisius. Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 1996. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. (Makalah) Disampaikan pada Seminar Sehari Tentang Narkotika, sek

dan Kekerasan Di Kalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta.

Salam R.A, dan Zanibar, Zen Zanibar. 1998. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*. (Jakarta : DISKUM POLRI).

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Perss).

Sudiro, Ahmad dan Bram, Deni Bram. 2013. *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.

Internet/Web

www.kpai.go.id/berita/pelaku-lebih-banyak-menyasar--anak-laki-laki/